

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai keadaan lingkungan alam yang berbeda-beda, berbeda bahasa, beraneka ragam kebudayaan penduduknya, berbeda-beda agamanya, berbeda-beda sejarah perkembangan pendidikan dan tingkat pendidikannya, berbeda tingkat perkembangan ekonomi, berbeda-beda prasarana komunikasi, berbeda-beda sarana transportasi serta keanekaragaman yang lain. Inilah gambaran keadaan umum negara Indonesia yang menjadi wilayah kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan adanya Keanekaragaman corak negara Indonesia, maka untuk menjaga warga masyarakat agar dapat melakukan produktivitasnya diperlukan suatu aturan, hukum atau norma, dan tugas profesi atau tugas-tugas keahlian sesuai dengan perkembangan masyarakatnya serta berbagai permasalahannya dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan polisi yang profesional dan terpercaya.

Dengan kata lain, fungsi utama Polisi adalah memelihara keteraturan atau mengembalikan keteraturan yang terganggu dalam hubungan antar individu maupun antar kelompok dan antar katagori yang tujuan akhirnya adalah menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga komuniti dan masyarakat, sehingga proses-proses produksi dapat berjalan dengan sebaik-

baiknya dan produktifitas dapat dijamin akan menghasilkan surplus yang memungkinkan tercapainya perkembangan agar masyarakat mentaati aturan tersebut perlu adanya suatu institusi yang menanganinya dan salah satunya adalah Polisi.

Menurut Richardson dalam profil Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Polisi adalah sebuah departemen pemerintahan yang didirikan untuk memelihara keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan.⁴⁴

Sedangkan menurut Prof. Harsja Bachtiar dijelaskan bahwa tugas-tugas kepolisian yang semula dilakukan sebagai seni (*craft*) dan dilakukan secara orang perorang telah berubah menjadi tugas-ekonomi dan kesejahteraan hidup warga dan masyarakatnya.⁴⁵ Sedangkan menurut Suparlan, fungsi-fungsi lainnya, seperti penegakan hukum, memerangi kejahatan, mengayomi warga masyarakat dan ancaman kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat dapat dilihat dalam perspektif menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat agar dapat berproduksi secara maksimal.⁴⁶

Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagai salah satu aparat pemerintahan mempunyai tugas dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia pada masyarakat Jawa Tengah. Dengan slogan : "KEGIATAN HARUS DAPAT DIBUKTIKAN,

⁴⁴ Tim Penyusun. 2007. *Profil Kepolisian Daerah Jawa Tengah*. PT Exatama Mediasindo hlm 23

⁴⁵ Ibid hlm 24

⁴⁶ Ibid hlm 24

HASH HARUS DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN, SUKSES TANPA EKSES", Kepolisian Daerah Jawa Tengah mulai menapak era baru dalam pemeliharaan kamtibmas melalui berbagai terobosan dan inovasi yang gemilang. Peran yang sangat strategis sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat ditunjukkan melalui berbagai kinerja aparat kepolisian Polda Jawa Tengah dengan tanpa meninggalkan jati diri sebagai insan Bhayangkara yang mulia, terpuji dan patuh hukum.⁴⁷

Dengan berbagai kendala yang dihadapi oleh kepolisian saat ini, Polda Jawa Tengah tetap bertekad untuk mengabdikan kepada masyarakat melalui berbagai kehadiran dan peran serta yang aktif pada setiap kegiatan masyarakat. Upaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dilakukan dalam rangka untuk merebut simpati masyarakat dengan tetap mengedepankan profesionalisme tugas kepolisian yang berdasarkan pada kompetensi, konsistensi dan komitmen pada bidang tugas yang diemban oleh seluruh aparat Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Sulit disangkal, bahwa polisi menempati kedudukan yang menonjol di antara birokrasi pemerintahan yang lain. Sebagai salah satu aparatur pemerintahan, seorang anggota polisi menjalankan peran fungsional dan simbolik yang penting dalam masyarakat, yang mewakili salah satu dari pelindung kebebasan yang paling penting dalam perorangan maupun kelompok masyarakat. Secara fungsional polisi dituntut untuk melaksanakan

⁴⁷ Ibid hlm 25

tugas dengan sikap etis, adil dan ramah, memberikan pelayanan dan menjaga ketertiban. Dalam tuntutan ini, petugas penegak hukum diberi wewenang besar untuk membatasi kebebasan gerak seseorang dan secara hukum dapat melakukan berbagai tindakan kepolisian dalam rangka proses penyidikan ataupun penyelidikan. Secara simbolis, petugas polisi bukan hanya merupakan lambang dari suatu sistem peradilan pidana yang paling jelas, namun mereka juga mewakili suatu sumber pembatasan yang sah dalam suatu masyarakat bebas (Barker dan David L. Carter, 1999 : 3). Dalam kaitan ini, peran seorang petugas polisi tidaklah mudah dalam suatu masyarakat yang demokratis. Petugas polisi bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, tetapi mereka harus berada dalam koridor batasan-batasan resmi yang sangat terbatas. Tuntutan untuk selalu bersikap profesional dalam pelaksanaan tugas selalu didengung-dengungkan dalam rangka menampik sikap skeptis masyarakat terhadap pelaksanaan tugas polisi di lapangan. Untuk meyakinkan hal itu, maka polisi harus dapat menjawab aspirasi masyarakat yang menginginkan pelaksanaan tugas polisi yang tidak saja sebagai penegak hukum namun lebih didasarkan pada pemikiran bahwa polisi adalah milik masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas polisi harus mampu menjawab keinginan dan tuntutan masyarakat.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah berkeinginan untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yang tetap berupaya menjadi yang terbaik dalam Kepolisian Daerah Jawa Tengah merupakan salah satu unsur pemerintahan di daerah Jawa Tengah yang

berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta berperan juga dalam penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan fungsi kepolisian yang diemban oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Menurut UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang dimaksud dengan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kewan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi kepolisian tersebut, Kepolisian Daerah Jawa Tengah terikat dalam suatu struktur organisasi kepolisian yang sistemik dan terjalin dalam suatu rantai komando kepemimpinan Polri pada tingkat Kepolisian Daerah. Struktur Organisasi pada Polri mengalami berbagai perkembangan dan validasi, dengan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Sesuai dengan validasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka struktur organisasi pada tingkat Kepolisian Daerah

diatur berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 , seperti digambarkan dalam struktur organisasi Kepolisian Daerah berikut ini :

Kepolisian Daerah Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan tugas pokoknya, seorang Kapolda bertugas memimpin anggota Polri pada tingkat Kepolisian Daerah dan membina serta mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Kepolisian Daerah. Kapolda juga bertugas memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep 111 \ I 2005 tanggal 31 Januari 2005, telah dilakukan Pengembangan Kesatuan Kepolisian Daerah Jawa Tengah menjadi Polda Tipe A1.⁴⁸ Kapolda Jawa Tengah dijabat oleh seorang Perwira Tinggi dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi (Jenderal Polisi berbintang dua). Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari seorang Kapolda dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kepolisian Daerah, yang dijabat oleh seorang Perwira Tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Jenderal Polisi berbintang satu). Kedua pejabat tinggi di tingkat Kepolisian daerah ini adalah merupakan unsur pimpinan pada struktur organisasi Kepolisian Daerah. Seorang Wakil Kepala Kepolisian Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Kepolisian Daerah

⁴⁸ Ibid hlm 65

dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Kepolisian Daerah, dan dalam batas kewenangannya memimpin Kepolisian Daerah dalam hal Kepala Kepolisian Daerah berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kepala Kepolisian Daerah.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kapolda dibantu oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dan 5 (lima) Biro, yang kesemuanya merupakan Unsur Pembantu Pimpinan/ Pelaksana Staf. Inspektorat Pengawasan Daerah dikepalai oleh Inspektur Pengawas Daerah (Irwada) yang dijabat oleh seorang Perwira Menengah (Pamen) berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol). Adapun tugas Itwasda adalah menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Kepolisian Daerah termasuk satuan-satuan organisasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kepolisian Daerah. Sedangkan kelima Biro sebagai unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Polda yang berada di bawah Kapolda, meliputi Biro Perencanaan dan Pengembangan (Rorenbang), Biro Operasional (Roops), Biro Pembinaan Kemitraan (Robinamitra), Biro Personel (Ropers) dan Biro Logistik (Rolog).⁴⁹

Biro Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Daerah. Kepala Biro Perencanaan dan

⁴⁹ Ibid hlm 87

Pengembangan dijabat oleh seorang Perwira Menengah dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol). Biro Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas antara lain, membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan penganggaran termasuk pemantauan / supervisi staf dan evaluasi atas penerapan sistem organisasi dan manajemen dalam lingkungan Kepolisian Daerah serta menyelenggarakan penelitian dan pengembangan sesuai program Kepolisian Daerah.⁵⁰

Biro Operasional dipimpin oleh Kepala Biro Operasional yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Daerah. Kepala Biro Operasional dijabat oleh seorang Perwira Menengah dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol). Biro Operasional bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasional termasuk pelatihan kesatuan dan pelatihan pra-operasi, koordinasi dan kerja sama dalam rangka operasi kepolisian serta pembinaan fasilitas dan administrasi perawatan tahanan.⁵¹

Biro Pembinaan Kemitraan dipimpin oleh Kepala Biro Pembinaan Kemitraan yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Daerah. Kepala Biro Pembinaan Kemitraan dijabat oleh seorang Perwira Menengah dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol). Biro Pembinaan Kemitraan mempunyai tugas membina dan dalam batas

⁵⁰ Ibid hlm 88

⁵¹ Ibid hlm 89

kewenangannya menyelenggarakan bimbingan masyarakat dan pembinaan kemitraan di lingkungan Kepolisian Daerah.

Biro Personel dipimpin oleh Kepala Biro Personel yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Daerah. Kepala Biro Personel dijabat oleh seorang Perwira Menengah dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol). Biro Personel mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang personel yang meliputi penyediaan, penggunaan, perawatan, pemisahan dan penyaluran personel termasuk psikologi kepolisian dan upaya peningkatan kesejahteraan personel di lingkungan Kepolisian Daerah.⁵²

Biro Logistik dipimpin oleh Kepala Biro Personel yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Daerah.

Kepala Biro Logistik dijabat oleh seorang Perwira Menengah dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol). Biro Logistik mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang logistik, yang meliputi perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa konstruksi, angkutan, pemeliharaan / perbaikan, inventory dan pergudangan.

Selanjutnya Kapolda juga dibantu oleh Unsur Pelaksana Pendidikan / Staf Khusus dan Pelayanan, yang terdiri dari Bidang Hubungan Masyarakat (Bid Humas), Bidang Pembinaan Hukum (Bid Binkum), Bidang Profesi dan

⁵² Ibid hlm 90

Pengamanan Internal (Bid Propam), Bidang Telekomunikasi dan Informatika (Bid Telematika), Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bid Dokkes), Bidang Keuangan (Bid Ku), Sekolah Polisi Negara (SPN), Sekretariat Umum (Setum) dan Detasemen Markas (Denma). Para Unsur Pembantu Pelaksana Pendidikan / Staf Khusus dan Pelayanan ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), kecuali untuk jabatan Kasetum dan Kadenma dijabat oleh Perwira Menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

Bidang Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Daerah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dijabat oleh seorang perwira menengah dengan pangkat Komisaris Besar Polisi yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Daerah. Bidang Pembinaan Hukum mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan HAM yang meliputi bantuan dan nasihat hukum, penerapan dan penyuluhan hukum dan HAM, turut serta dalam pembinaan hukum maupun peraturan daerah.

Bidang Telematika (telekomunikasi dan informatika) perwira menengah dengan pangkat Komisaris Besar Polisi dan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat melalui pengelolaan dan penyampaian pemberitaan/informasi serta kerja sama / kemitraan dengan

media massa dalam rangka pembentukan opini masyarakat yang positif bagi pelaksanaan tugas Polri.

Bidang Pembinaan Hukum dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan Hukum dijabat oleh seorang dipimpin oleh Kepala Bidang Telematika dijabat oleh seorang perwira menengah dengan pangkat Komisaris Besar Polisi yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Daerah. Bidang Telematika mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) dipimpin oleh Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Daerah. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan dijabat oleh seorang perwira menengah dengan pangkat Komisaris Besar Polisi, yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina fungsi kedokteran dan kesehatan Polri meliputi bidang kedokteran kepolisian, kesamaptaaan dan pelayanan kesehatan, baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Bidang Keuangan (Bid Ku) dipimpin oleh Kepala Bidang Keuangan dijabat oleh seorang perwira menengah dengan pangkat Komisaris Besar Polisi yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Daerah.

Bidang Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan.

Sekolah Polisi Negara (SPN) dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah Polisi Negara (Ka SPN), yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Daerah. Kepala SPN dijabat oleh seorang perwira menengah dengan pangkat Komisaris Besar Polisi mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Bintara/Tamtama Polri serta pendidikan dan pelatihan lain sesuai program/ kebijakan pimpinan Polda.⁵³

Sekretariat Umum (Setum) dipimpin oleh Kepala Sekretariat Umum (Kasetum) yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Daerah. Setum bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kesekretariatan/ administrasi umum yang meliputi korespondensi, ketatalaksanaan perkantoran dan pengarsipan, termasuk penyelenggaraan kantor pos dan perpustakaan.

Detasemen Markas dipimpin oleh seorang Kepala Detasemen Markas (Kadenma) yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Daerah. Denma mempunyai tugas dalam hal penyelenggaraan pelayanan markas yang meliputi pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan

⁵³ Ibid hlm 70

protokol dan penjagaan markas serta urusan dalam di lingkungan Markas Kepolisian Daerah.

Selain Unsur Pembantu Pimpinan dan Unsur Pembantu Pelaksana Pendidikan / Staf Khusus dan Pelayanan, Kepala Kepolisian Daerah dalam menjalankan tugas-tugas fungsi kepolisian dibantu oleh Unsur Pelaksana Utama, yang terdiri dari Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam), Direktorat Reserse dan Kriminal (Ditreskrim), Direktorat Narkoba, Detasemen 88 Anti Teror (Den 88 AT), Direktorat Samapta (Ditsamapta), Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas), Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) dan Satuan Brigade Mobil (Satbrimob). Unsur Pelaksana Utama ini dipimpin oleh seorang Direktur dan Kepala Satuan (khusus untuk Satbrimob dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Brimob) serta Kepala Detasemen (Untuk Detasemen 88 Anti teror) yang dijabat oleh seorang Perwira Menengah berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol).

Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) dipimpin oleh seorang Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Daerah. Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dan peringatan dini bagi seluruh jajaran Polda serta memberikan

pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api/bahan peledak, orang asing dan kegiatan sosial/ politik masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Reserse dan Kriminal (Ditreskrim) dipimpin oleh seorang Direktur Reserse dan Kriminal (Dirreskrim) yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Daerah. Direktorat Reserse dan Kriminal bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk tindak pidana terorisme, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Direktorat Narkoba adalah unsur pelaksana Kepolisian Daerah tertentu yang merupakan pemekaran dan berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah yang pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atas usulan Kepala Kepolisian Daerah. Direktorat Narkoba dipimpin oleh seorang Direktur Narkoba yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Daerah. Direktorat Narkoba mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan obat berbahaya (Narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Detasemen 88 Anti Teror (Den 88 AT) adalah unsur pelaksana utama Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Detasemen 88 Anti Teror (Kaden 88 AT) yang sehari-hari bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah. Detasemen 88 AT bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta tugas lain di bidang tindak pidana terorisme.

Direktorat Samapta dipimpin oleh seorang Direktur Samapta yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Daerah. Direktorat Samapta bertugas membina fungsi kesamaptaan kepolisian dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan patroli antar wilayah, termasuk pengamanan obyek khusus yang meliputi VIP, pariwisata dan obyek vital / khusus lainnya, serta bantuan Satwa, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa.

Direktorat Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Direktur Lalu lintas yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Daerah. Direktorat Lalu Lintas mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah.

Direktorat Kepolisian Pengairan dipimpin oleh seorang Direktur Kepolisian Pengairan yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Daerah. Direktorat Kepolisian Pengairan bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian serta penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, melakukan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Kepolisian Daerah.

Selanjutnya, Kesatuan Brigade Mobile (Sat Brimob) adalah satuan pelaksana utama Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah. Sat Brimob bertugas melaksanakan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi, terorisme, huru hara/ kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak termasuk penyelamatan dan pertolongan (SAR) akibat bencana alam maupun gangguan lainnya bersama unsure pelaksana operasional kepolisian lainnya, dalam rangka penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, yang dilaksanakan sesuai perintah Kepala Kepolisian Daerah atau permintaan mendesak dari Satuan fungsi/kewilayahan Polda. Sat Brimob dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Brimob yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Daerah.

2.2 Polisi Wanita Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Kekuatan personil Polda Jawa Tengah sampai pada periode Maret 2011 berjumlah 27.400 personil yang tersebar pada satuan kerja di Polda Jawa Tengah dan satuan wilayah di Polres se-Jawa Tengah sebanyak 35 Polres dan Polrestabes. Dari jumlah tersebut sebanyak 1868 adalah personel wanita yang menduduki jabatan pada berbagai fungsi kepolisian baik operasional maupun pembinaan dalam pendidikan. Dari jumlah tersebut terdapat jabatan Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) maupun Kepala Satuan (Kasat) Operasional sejumlah 35 orang yang tersebar di 35 Polres se – Jawa Tengah.

Pada periode tahun 2004 s.d 2008 di Jawa Tengah pernah memberikan kepercayaan jabatan Kepala Satuan Resort (Kapolres) di 4 Polres yaitu Semarang Barat, Wonogiri, Sragen dan Karang Anyar, yang dijabat oleh 2 orang Polisi Wanita (Polwan) berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Adapun untuk Polsek dan Kasat Operasional dijabat setingkat Ajun Komisaris Polisi (AKP).

Pada jabatan Kapolres, dalam satu kesatuan mempunyai anak buah yang dipimpin sebanyak kurang lebih \pm 700 orang, sedangkan pada tingkat Polsek \pm 35 personil.

Untuk menduduki jabatan setingkat Kapolsek seorang Polwan harus memenuhi syarat kemampuan, pangkat maupun pendidikan. Mereka harus mampu dan paham berbagai fungsi kepolisian baik operasional maupun pembinaan anak buah, kegiatan maupun mengatur administrasi secara

menyeluruh. Pengawasan bidang manajemen sumber daya manusia, sarana prasarana maupun pertanggungjawaban anggaran yang diberikan melalui DIPA.

Untuk seorang Kapolsek pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) mempunyai latar belakang pendidikan dari Secapa, Akpol maupun Sepa. Sedangkan jabatan setingkat Kapolres harus memiliki latar belakang pendidikan sekolah pimpinan.

Tabel 2.1 Distribusi Polisi Wanita di wilayah Polda Jawa Tengah.⁵⁴

NO.	SATUAN TUGAS	FUNGSI		TOTAL
		ADM	OPS	
1.	Polwil Banyumas	32	64	96
2.	Polwitabes Semarang	66	138	204
3.	Polwil Pekalongan	43	41	84
4.	Polwil Pati	34	53	87
5.	Polwil Surakarta	59	122	181
6.	Polwil Kedu	49	64	113
7.	Polda Jateng	145	64	209
	Total	428	546	974

Tabel 2.2 Data Polisi Wanita yang menjadi pejabat di wilayah Polda Jawa Tengah.⁵⁵

NO.	Tempat Tugas	TOTAL
1.	Kapolres	2
2.	Kapolsek	16
3.	Kepala Dit Keamanan Object Vital	2
4.	Kepala Dit Binamitra	5
5.	Kepala Polsekta	2
6.	Kepala Patroli	1

⁵⁴ Benjamin, dkk. *Women in Uniform*. Jakarta. Partnership. 2006. Hlm. 32
⁵⁵ *Ibid*. Hlm. 32

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa di Jawa Tengah pernah menjabat 2 orang polisi wanita yang menjadi Kepala Kepolisian Resort yaitu di wilayah Karanganyar dan Wonogiri. Beberapa puluh Kapolsek perempuan sampai saat ini masih menjabat dengan memimpin polsek – polsek di kota maupun pedesaan. Demikian pula Kasat fungsi Lalu lintas, Samapta, Reserse, dan Bimamitra sampai saat ini masih ada yang dijabat oleh perempuan.

2.3 Polwan dalam Penempatan dan Karier

2.3.1 Gender Dalam Kepolisian

Kepolisian adalah suatu institusi masyarakat dan didalamnya juga berlangsung proses transformasi tersebut. Dalam kaitan ini, institusi kepolisian biasa disebut sebagai dunia kerja laki – laki.

Ada dua sebab yang membuat kepolisian disebut sebagai dunia kerja laki – laki. Kedua sebab tersebut tidak mandiri tetapi saling terkait dan memengaruhi. Sebab pertama adalah adanya kebudayaan polisi dengan etnosentrisme golongan laki – laki yang kuat yaitu kebudayaan patriarkal, kebudayaan yang selalu mengedepankan patriak (ayah/laki-laki) karena selama berabad – abad, kepolisian adalah suatu pranata yang hanya beranggotakan laki-laki. Kebudayaan kepolisian tersebut merupakan sekumpulan norma budaya dalam kehidupan sehari – hari petugas polisi yang diturunkan secara berkelanjutan kepada polisi baru dari generasi ke generasi dan

didefinisikan ulang sesuai dengan situasi lingkungan yang dihadapinya.

Di Indonesia kebudayaan atau norma tersebut berlangsung sepanjang sejarah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meskipun terjadi berbagai perubahan tujuan dan status Polri yang tercermin dalam sejarah Polri. Adapun polwan sebagai golongan yang berbeda dengan golongan polki, baru masuk Polri pada tahun 1948, awalnya berjumlah enam orang dan pada saat ini.

Mengenai kebudayaan, Reiner (2000;85) mendefinisikan: "kebudayaan merupakan nilai, sikap, simbol, aturan dan praktik, yang muncul ketika manusia menanggapi keadaan dan situasi yang dihadapinya, menginterpretasi melalui kerangka kognitif dan orientasi yang dibawanya atas dasar pengalaman hidupnya, menyangkut seluruh pandangan hidup (*way of life*) suatu masyarakat; keyakinan dan kepercayaannya; pranata dan sistemnya; hukum dan adat kebiasaannya".

Pada dasarnya itu sama dengan pendapat Suparlan (2003:9) yang menyatakan bahwa setiap kebudayaan berintikan nilai budaya yang mengintegrasikan berbagai unsur kebudayaan sehingga operasional sebagai acuan atau pedoman bagi tindakan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kebudayaan dapat disebutkan sebagai cetak biru atau pedoman bagi kehidupan manusia dalam menghadapi dan memanfaatkan lingkungan beserta isinya.

Dalam hal ini Polri harus dilihat sebagai sebuah dunia kerja laki-laki. Polri sangat lama, bahkan hingga kini, beranggotakan mayoritas laki-laki. Dengan demikian tidak mengherankan apabila selama ini Polri diorganisasi, dikelola serta membentuk kebudayaan khas laki-laki. Apabila di sebuah lingkungan kerja, selama berabad-abad semua anggotanya hanya laki-laki, dapat diperkirakan bahwa di dalamnya akan terbentuk sebuah kebudayaan khas laki-laki.

Hal itu tercermin dalam sikap dan perilaku tetapi juga pada nilai, norma, perspektif, dan aturan teknis yang mereka pahami dan percayai kebenarannya yang muncul ketika polisi laki-laki (polki) menanggapi keadaan dan situasi yang dihadapinya. Mereka menginterpretasi semua itu melalui kerangka kognitif dan orientasi yang dibawanya atas dasar pengalaman hidupnya dan meneruskannya kepada polisi baru yang secara berlanjut mengembangkan kebudayaan polisi itu. Hal itu berlangsung selama puluhan generasi yang semuanya laki-laki.

Dalam lembaga kepolisian, kekuatan laki-laki dinyatakan otentik dan diterima sebagai bagian dari hubungan sosial. Legitimasi kekuatan laki-laki di kepolisian memberikan kepada mereka otoritas besar. Dengan demikian hubungan gender atas dasar kekuatan mendorong dan membatasi aksi sosial polki dan polwan.

Akibatnya, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pekerjaan polisi didefinisikan secara kultural sebagai aktivitas yang hanya mampu dilakukan "laki-laki maskulin" dan pekerjaan polisi dilihat

baik oleh polisi sendiri maupun masyarakat sebagai tujuan maskulin. Maka, tidak mengherankan apabila kepolisian cenderung dikuasai oleh kebudayaan yang selalu dipersepsi harus bernuansa lelaki-lakian, keras, kasar dan hanya pantas dikerjakan laki-laki dan merupakan dunia kerja laki-laki.

Semua itu dapat dihubungkan dengan inti kebudayaan polisi, yang menurut Skolnick ada kaitannya dengan kepribadian kerja (*working personality*) polisi. Polisi dianggapnya mempunyai kombinasi faset peran yang unik yaitu, bahaya dan wewenang yang harus diinterpretasikan dalam bayangan tekanan secara terus menerus agar kelihatan efisien (Skolnick, 2000: 139; Walker 1992 : 331-334; Shapland, 1988: 152- -154). Ketiga hal ini yaitu mengelola bahaya dan wewenang yang harus dilakukan secara efisien, ditanggapi polisi yang sebagian besar laki-laki dengan menerapkan sikap maskulin yang lugas, tegas, cepat, pragmatis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama berabad-abad telah terbentuk kebudayaan polisi yang khas laki-laki dengan ciri-ciri maskulin dan patriarkal yang kuat, artinya nilai-nilai, sikap, simbol, norma, perspektif, bahkan aturan teknis dan praktik dipedomani oleh pandangan dan kepentingan golongan laki-laki. Apalagi di Indonesia, selama tiga dekade Polri menjadi bagian organisasi militer. Akibatnya, kebudayaan militeristik telah membuat kepolisian yang

diorganisasikan secara quasi militer, makin tebal maskulinitas dan patriarki serta *chauvinisme* golongan laki-lakinya.

Kebudayaan kepolisian tersebut tercermin dari jumlah polki di kepolisian yang selalu jauh lebih besar dibandingkan jumlah polwan. Dalam sistem penggolongan, dikenal konsep dominan yang diacu untuk mengidentifikasi corak jati diri seseorang atau sesuatu kelompok dalam hubungannya dengan corak jati diri seseorang atau kelompok lainnya, dalam perspektif hubungan kekuatan, yaitu adanya kekuatan berlebih, atau lebih besar dari, atau tidak terkalahkan oleh yang lain (Suparlan, 2001).

Golongan polwan merupakan golongan minoritas dan nondominan karena kondisinya berbanding terbalik dengan keadaan golongan polki. Jumlahnya hanya sekitar tiga persen dari jumlah anggota Polri dan 70 persen di antara mereka berpangkat bintara atau pelaksana, serta tidak seorang pun yang menduduki jabatan penentu kebijakan di tingkat tinggi.

Sebaliknya, Polri adalah golongan mayoritas karena jumlahnya, yaitu sekitar 96 persen dari keseluruhan jumlah anggota Polri, dan juga merupakan golongan dominan karena menguasai semua jabatan pimpinan tinggi dan 90 persen jabatan pimpinan menengah Polri. Dengan demikian, sebenarnya golongan polkilah yang menentukan seluruh kebijakan Polri yang menjurus kepada pemenuhan kebutuhan sesuai dengan kepentingan golongannya

2.3.2 Sistem Penggolongan di Kepolisian

Hubungan polwan-polki di tempat kerjanya dapat didalami melalui pembahasan tentang sistem penggolongan karena polwan dan polki adalah kategori atau golongan. Menurut Suparlan (2001:1-6), isi sebuah kebudayaan pada dasarnya adalah "adanya sistem-sistem penggolongan". Artinya, hubungan polwan-poiki merupakan hubungan antar kategori atau hubungan antargolongan. Hubungan polwan-poiki merupakan hubungan antarpelaku dan akan menghasilkan berbagai struktur. Dalam struktur itulah terbentuk posisi, peran, dan status tiap-tiap pelaku hubungan, polwan dan lawan golongannya, polki.

Sebagaimana disebutkan terdahulu, setiap golongan termasuk polwan dan polki dapat dibedakan karena mempunyai ciri-ciri jati diri sendiri yang berbeda yang terwujud dalam berbagai stereotipe dan atribut. Melalui interaksi, masing-masing golongan menciptakan dan memantapkan apa yang disebut batas golongan. Batas itu digunakan untuk menunjukkan perbedaan golongan dan melalui batas golongan itu stereotipe mengenai diri masing-masing tetap lestari.

Pembedaan penggolongan atas dasar gender, misalnya, berlaku dalam kepolisian meskipun formalitas peran polwan sebagai seorang polisi pada dasarnya tidak dibedakan dengan peran polki. Karena polwan juga masuk ke dalam golongan perempuan, peran gender perempuan mendapat penekanan dalam menentukan posisinya. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila di mana-mana polwan selalu

dijadikan sekretaris pribadi kepala polisi. Itu bukan karena kemampuan profesionalnya melainkan dan terutama karena sebagai perempuan dengan gendernya, ia dianggap akan dapat melayani tamu dengan lebih ramah dan menyenangkan.

Sementara itu, atas dasar peran gender yang dihayatinya, polwan sendiri menganggap semua itu sebagai kewajaran. Sebagai perempuan sudah sepantasnya mendapatkan tugas itu (melayani). Bahkan, sebagian polwan memanfaatkan penugasan itu sebagai kesempatan untuk mendekati pimpinan untuk kepentingan pribadinya. Artinya, polwan sendiri menerima posisi dan peran gender yang diberikan kepadanya dengan sukarela karena menganggapnya wajar dan dalam hal tertentu dapat dimanfaatkan.

Meskipun demikian, hubungan posisi dengan peran polwan tidak semata-mata ditentukan oleh penggolongan atas dasar gender karena setiap hubungan dipengaruhi oleh konteksnya. Dalam hal ini pelaku hubungan mempunyai kemampuan memanipulasi, pelaku dapat memanfaatkan ciri jati diri golongan yang lain yang dianggap lebih menguntungkan seperti misalnya golongan kepangkatan, perwira atau bintara; jabatan; fungsi kepolisian yang dilakukan; golongan atas dasar latar belakang pendidikan maupun ekonomi; senioritas atau bahkan latar belakang keluarga, ras, suku, agama dan sebagainya. Demikian juga sebaliknya, lawan hubungan dapat memanfaatkan dan

memanipulasi ciri golongan atau jati diri miliknya dan milik lawan golongannya untuk kepentingannya

2.3.3 Kegiatan Komunikasi Interpersonal dan Gaya Kepemimpinan Perempuan di Polda Jawa Tengah

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, asumsi pertama dalam membicarakan posisi polwan dalam dunia kerja laki-laki ialah bahwa kepolisian sebagai pranata sosial, selama berabad-abad hanya mempunyai anggota laki-laki. Dengan demikian dalam kepolisian telah terbentuk kebudayaan khas laki-laki yang pada dasarnya menolak perempuan.

Kepolisian dianggap sebagai dunia kerja laki-laki mudah dimengerti karena dimana-mana kehadiran polisi wanita dalam lingkungan polisi relatif baru. Di Amerika Serikat, polwan baru ada pada tahun 1903, sedang di Inggris pada tahun 1907. Pada awal rekrutmennya, di kedua negara itu pun, polwan hanya disertai tugas yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak. Karena dianggap tugas itu memang tugas perempuan, seperti menjaga tahanan perempuan dan anak-anak, dan mengawasi kenakalan remaja.

Di Indonesia, kepolisian baru merekrut perempuan menjadi polisi pada tahun 1948, sebelumnya kepolisian adalah dunia kerja yang dimonopoli laki-laki. Rekrutmen polwan pertama di Indonesia itu pun dilakukan Polri karena desakan masyarakat dalam suasana revolusi,

agar pemeriksaan termasuk penggeledahan pengungsi perempuan tidak dilakukan polki. Tradisi menganggap polisi adalah dunia kerja laki-laki terbukti ketika Polri terlihat segan dan ragu menerima polwan dan ketika selama sepuluh tahun kemudian tidak ada rekrutmen tambahan untuk polwan dibatasi dan tidak diperkenankan melakukan tugas kepolisian yang lain, terutama patroli.

Pada tahun 1956, keenam polwan yang direkrut pada tahun 1948 harus meminta dukungan gerakan (Kowani dan Bhayangkari) dan tokoh-tokoh perempuan agar rekrutmen polwan dilakukan kembali. Setelah berhasil, rekrutmen polwan berlangsung rutin, tetapi jumlah polwan di Indonesia pun tidak pernah lebih dari lima persen jumlah anggota Polri (Data Bagpolwan Desumdaman Kapolri 2003). Apalagi ketika Orde Baru berkuasa, Polri menjadi bagian ABRI, Polri yang diorganisasikan secara quasi militer menjadi berkebudayaan militeristik yang seksis dan sangat menolak kehadiran perempuan.

Hal yang paling menunjukkan bahwa kepolisian merupakan dunia kerja laki-laki adalah orang berpikir bahwa ada aspek-aspek tertentu dalam pekerjaan polisi yang tidak cocok untuk perempuan. Pertama; dipercayai bahwa perempuan tidak cocok menjadi polisi karena pekerjaan itu dianggap membutuhkan dominasi, agresivitas, superioritas dan kekuatan. Polwan dianggap tidak mampu mengatasi bahaya, tidak mampu melaksanakan kewenangan, dan tidak seharusnya didorong untuk melakukan pekerjaan yang dianggap dapat

menurunkan martabatnya sebagai perempuan. Padahal, menurut Thibault (2001; 57) berbagai penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar dalam melaksanakan tugas kepolisian antara polwan dan polki, bahkan polwan dan polki pada dasarnya dapat saling melengkapi polisi wanita, dalam sebagian besar penanganan kasus, secara emosional jauh lebih stabil daripada rekan prianya dan kurang menunjukkan sikap macho yang inheren pada sebagian besar kepribadian polisi pria. Polisi wanita dengan kepribadiannya yang kurang agresif kemungkinan lebih besar meredakan situasi kekerasan secara potensial dan menghindari luka-luka pada semua yang terlibat.

Anggapan bahwa kepolisian adalah dunia kerja laki-laki tidak hanya dimiliki oleh polki. Masyarakat umum juga mempunyai persepsi demikian. Selama ini tidak ada atau sedikit sekali tanggapan masyarakat atas jumlah polwan yang tidak seimbang dan sedikitnya jumlah polwan yang berpangkat tinggi, sehingga pada dasarnya penolakan itu juga merupakan cerminan pendapat masyarakat (Heidensohn, 1995:173). Masyarakat juga masih menganggap pekerjaan polisi sebagai pekerjaan laki-laki dan tebal anggapan bahwa perempuan "kurang kuat" dan "kurang pantas" untuk melakukannya.

Kenyataan itu menunjukkan bahwa kelihatannya mereka direkrut hanya untuk memenuhi quota dan bahwa mereka diperbolehkan berkompetisi hanya untuk promosi atau jabatan di bagian yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan. Data jumlah polwan atau

persentase perempuan di kepolisian menguatkan pendapat itu dan merupakan masalah yang konsisten dan paling signifikan memengaruhi persepsi dan pengalaman polwan. Semua itu menunjukkan bahwa organisasi kepolisian pada umumnya mutlak dikuasai golongan laki-laki dan tabu dimasuki golongan perempuan.

Kepolisian merupakan dunia kerja laki-laki adalah ketika orang berpikir bahwa ada aspek-aspek tertentu dalam pekerjaan polisi yang tidak cocok untuk perempuan. Pertama; perempuan dipercaya sebagai tidak cocok menjadi polisi karena pekerjaan itu dianggap membutuhkan dominasi, agresivitas, superioritas dan kekuatan. Polwan dianggap tidak mampu mengatasi bahaya, tidak mampu melaksanakan kewenangan, dan tidak seharusnya didorong untuk melakukan pekerjaan yang dianggap dapat menurunkan martabatnya sebagai perempuan. Padahal, menurut Thibault (2001; 57), berbagai penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar dalam melaksanakan tugas kepolisian antara polwan dan polki, bahkan polwan dan polki pada dasarnya dapat saling melengkapi.

"Polisi perempuan, dalam sebagian besar penanganan kasus, secara emosional jauh lebih stabil daripada rekan prianya dan kurang menunjukkan sikap macho yang inheren pada sebagian besar kepribadian polisi pria. Polisi perempuan dengan kepribadiannya yang kurang agresif kemungkinan lebih besar meredakan situasi kekerasan secara potensial dan menghindari luka-luka pada semua yang terlibat"

Kedua, ada ketakutan bahwa masuknya perempuan ke dalam kepolisian, akan "mengurangi solidaritas laki-laki, mengancam

keamanan, dan citra dirinya". Argumentasi Ini secara sinis disebut oleh Heidensohn sebagai argumentasi "polisi porselen", artinya polki ditempatkan begitu rentan (fragile) dan rapuh sehingga mereka merasa terancam akan direndahkan dan solidaritasnya akan hancur, serta loyalitasnya akan rusak karena kehadiran perempuan.

Ketiga, polwan harus mampu mengatasi masalah norma yang dapat menimbulkan masalah dalam hubungannya dengan polisi laki-laki. Sumpah serapah, lelucon seksual/porno disebut sebagai kebiasaan yang tidak terpisahkan, atau bagian dari kultur polisi, dan perempuan tidak seharusnya terlibat dalam aspek yang satu ini. Hal ini memang terbukti dalam penelitian yang saya lakukan. Seorang polwan muda sebagai satu-satunya perempuan di sebuah unit kepolisian, mengaku bahwa semula ia harus menguat-nguatkan diri karena teman polki sering bicara seenaknya sendiri dengan berteriak-teriak, bahkan sering bicara yang "jorok-jorok". Akan tetapi, setelah setahun bekerja di sana, ia sudah terbiasa dengan suasana itu, meskipun dia tidak ikut berteriak dan bicara jorok, dia merasa kehadirannya dapat mengurangi kebiasaan jelek rekan-rekannya.

Kenyataan itu menunjukkan bahwa polisi perempuan hanya direkrut untuk memenuhi quota, dan bahwa mereka diperbolehkan berkompetisi hanya untuk promosi atau jabatan di bagian yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan. Data jumlah polwan atau persentase perempuan di kepolisian menguatkan pendapat itu dan

merupakan masalah yang konsisten dan paling signifikan memengaruhi persepsi dan pengalaman polwan. Semua itu menunjukkan bahwa organisasi kepolisian pada umumnya mutlak dikuasai golongan laki-laki dan tabu dimasuki golongan perempuan.

Menanggapi situasi kerja yang penuh penolakan tersebut, menurut beberapa penelitian terdapat perbedaan tanggapan polwan, mereka bertahan pada jati diri femininnya atau menyesuaikan diri. Ada istilah *defeminized* dan *deprofesionalized*, polwan yang termasuk *defeminized* adalah mereka yang dapat berubah sangat efisien yang melihat dirinya sebaik bahkan lebih baik dari rekan polkinya, sedang yang termasuk *deprofesionalized* adalah mereka yang pasrah menerima status ter subordinasi.

Martin (dikutip Van Wormer 2000: 167) memberi kategori polwan yang termasuk POLICEwomen dan policeWOMEN. Yang termasuk POLICEwomen adalah mereka yang lebih memfokuskan diri kepada fungsi penegakan hukum dibandingkan pelayanan. Mereka menunjukkan komitmen tinggi terhadap tugas dan bahkan sering mengkritik rekannya sesama polwan. Seperti polki, mereka berharap dapat menjadi spesialis dan dipromosikan di sana. Sedang polwan yang termasuk police WOMEN lebih menekankan kepada feminitas dan menerima saja tugas yang tidak setara atau tugas pembantu. Mereka biasanya tidak akan mendapatkan tugas yang dianggap tidak cocok bagi seorang "*lady*" atau "perempuan terhormat".

Membahas tentang komunikasi interpersonal di kalangan polisi wanita akan dapat dijelaskan secara mendetail bila fakta kegiatan dari polisi wanita dihubungkan dengan berbagai kegiatan yaitu menangani masalah :

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Berkaitan dengan kasus KDRT, polisi berwenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Dalam menangani kasus KDRT, polisi harus sanggup untuk bekerja selama 24 jam setiap hari, dan sanggup untuk melakukan tindakan segera.

Kewajiban polisi dalam penanganan KDRT sesuai UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antar lain :

- Memberi perlindungan kepada korban (pasal 10 dan 16 UU R4 PKDRT)
- Bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (pasal 17 UU m PKDRT)
- Memberikan penjelasan kepada korban tentang hak-haknya untuk mendapat pelayanan dan pendampingan (pasal 18 UU PKDRT)

- Melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya KDRT (pasal 19 UU KDRT).
- Menyampaikan kepada korban tentang identitas petugas, kewajiban polisi untuk melindungi korban, dan bahwa KDRT adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan (pasal 20 UU PKDRT).

Kemampuan interpersonal komunikasi yang dapat dimanfaatkan pada saat menangani kasus KDRT akan sangat dibutuhkan karena dalam komunikasi interpersonal ini para korban KDRT harus diciptakan suasana bahwa dia percaya pada polisi yang menangani kasusnya, korban merasa bila ditangani oleh polisi wanita muncul sikap support/dorongan untuk lebih kuat menghadapi masalah yang menimpa korban. Keterbukaan yang dilakukan oleh Polwan dalam menangani masalah KDRT dengan menunjukkan empati pada korban dan tekanan nada suara dan ekspresi muka merupakan pemberi dari perilaku polisi laki – laki dalam menangani kasus KDRT

Demikian juga pada kasus human trafficking (perdagangan manusia) yang setiap kesatuan wilayah selalu ada kantong – kantong pedesaan sebagai basis pengekspor tenaga kerja yang kebanyakan perempuan.

Laporan Human Rights Watch, menunjukkan bagaimana buruh migran yang akan bekerja sebagai pekerja rumah tangga mengalami diskriminasi dan kekerasan dalam seluruh proses migrasi: dipaksa bayar suap, disekap, diperlambat waktu pemberangkatan dengan alasan wajah yang jelek, dan bentuk tubuh yang gemuk, dilecehkan secara

seksual dan dimaki. Tidak jarang pula, para korban tidak berdaya karena diancam atau dipaksa untuk menjadi perempuan penghibur atau pekerja seks yang sama sekali tidak terbayangkan sebelumnya.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan Orang dalam undang-undang ini didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Peranan polisi dalam pemberantasan kejahatan perdagangan orang ini sangat diperlukan ketelitian dan kepedulian, sehingga jika ada tindak pidana yang mengarah ke trafiking (sebelum terjadinya *trafiking*) dapat dicegah, korban dilindungi, dan pelakunya dapat dipidana.

Peran polisi dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang bisa dimulai dari pencegahan dan penanganan kasus. Pencegahan perdagangan orang dapat dilakukan dengan pendekatan polmas, dimana polisi dan masyarakat bersama-sama memahami bahwa masalah perdagangan orang merupakan masalah keamanan

insani (*human security*), kemudian bersama-sama pula memecahkan masalah-masalah yang mengarah pada pola perekrutan di tingkat desa. Dengan demikian, perdagangan orang dapat dicegah. Sedangkan dalam proses penanganan kasus-kasus perdagangan orang polisi tidak hanya memfokuskan diri pada pelaku/tersangka, melainkan juga memperhatikan kondisi dan situasi korban yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Korban bukan semata-mata berposisi untuk melengkapi penyidikan atau persidangan pelaku, melainkan orang-orang yang harus dilindungi hak-haknya termasuk hak untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.

Gaya kepemimpinan polisi wanita dilingkungan kesatuan wilayah yang mayoritas pekerjaanya laki – laki juga mempunyai gaya tersendiri, yang seringkali muncul adalah gaya kepemimpinan konkret leadership semacam kepemimpinan yang bisa bersikap tegas seperti besi bila yang dihadapi memerlukan proses pengambilan keputusan cepat dan segera serta seperti rahasia (*secret*) bila memerlukan suatu tindakan kehati – hatian, ketelitian, kelembutan dan yang mampu meningkatkan situasi konflik yang terjadi dalam menangani berbagai kasus yang terjadi berupa konflik diberbagai hal baik politik, social, ekonomi, dan yang lain, kemampuan melakukan negosiasi dan memfasilitasi suatu perdamaian seringkali dilakukan oleh para pemimpin perempuan di seluruh wilayah Polda Jawa Tengah. Kasus – kasus seperti Cakrawala di Polres Semarang Barat tahun 2005, kasus – kasus bentrok antar

kampung, bentrok antar perguruan silat, perebutan tanah garapan adalah berbagai masalah yang berdasarkan pengalaman penulis maupun hasil wawancara pada para Kapolsek maupun Kasat Fungsional perempuan sebagai bukti dan fakta tentang kemampuan komunikasi interpersonal dan gaya kepemimpinan perempuan di Polda Jawa Tengah.